

SHOULD WE FOLLOW THE WORLD BANK?: A CASE OF VAT THRESHOLD IN INDONESIA

Muhammad Rheza Ramadhan

rhezakz@gmail.com
Direktorat Jenderal Pajak

Budi Arifandi

budi.arifandi@kemenkeu.go.id
Direktorat Jenderal Pajak

Abstrak

Pada pertengahan tahun 2024, Bank Dunia menyarankan Indonesia untuk menurunkan ambang batas PKP dari Rp4,8 miliar menjadi Rp600 juta. Hal ini sejalan dengan saran Bank Dunia sebelumnya pada tahun 2020 dan 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi saran Bank Dunia tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan melakukan regresi OLS dengan data cross-section antar negara untuk melihat faktor-faktor yang menentukan ambang batas PKP di suatu negara. Variabel independen yang dianalisis antara lain persentase pekerja yang bekerja di UMKM, rasio GINI, PDB per Kapita (PPP), dan variabel dummy yang menunjukkan kategori negara, yaitu negara berpendapatan tinggi, negara berpendapatan menengah ke bawah, negara berpendapatan menengah ke atas, dan negara berpendapatan rendah. Kemudian, analisis kualitatif dilakukan untuk mengevaluasi ambang batas PKP Indonesia dari empat sisi: biaya kepatuhan, proporsi pekerja yang bekerja di UMKM, ketimpangan pendapatan, dan fenomena bunching yang akan terjadi akibat penurunan ambang batas PPN. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ambang batas PKP adalah murni kebijakan dari suatu negara dimana prioritas politik dan arah kebijakan pemerintah menjadi hal yang penting. Selain itu, jika dilihat dari empat sisi yang diteliti dalam analisis kualitatif, penurunan ambang batas PKP belum layak untuk dilakukan pada saat ini.

Abstract

In mid-2024, the World Bank advised Indonesia to lower the VAT threshold from IDR 4.8 billion to IDR 600 million. This is in line with the World Bank's previous advice in 2020 and 2021. This study aims to evaluate that World Bank's suggestion. The method used in this research is a mixed method between quantitative methods and qualitative methods. The quantitative method is done by conducting OLS regression with cross-section data between countries to see the factors that determine the VAT threshold in a country. The independent variables analyzed include the percentage of employees working in MSMEs, GINI ratio, GDP per Capita (PPP), and dummy variables that indicate the country category, namely high-income country, low-middle income country, upper-middle income country, and low-income country. Then, a qualitative analysis was conducted to evaluate

Indonesia's VAT threshold from four sides: compliance cost, proportion of employees working in MSMEs, income inequality, and bunching phenomenon that will occur due to the reduction of VAT threshold. The results of this study conclude that the VAT threshold is purely a policy of a country where political priorities and policy direction are important. In addition, if we look at the four sides studied in qualitative analysis, reducing the VAT threshold is not feasible at this time.

Kata Kunci: *pajak pertambahan nilai, ambang batas PKP, the world bank*